

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara melalui pemerintah yang tidak dapat menjalankan peranan sebagaimana mestinya akan menjadi salah satu potensi sumber utama konflik internal. Pemerintahan yang cenderung tidak aspiratif, marginalisasi hak-hak politik rakyat, kesejahteraan yang cenderung menurun, serta pengekangan terhadap kebebasan berekspresi menjadi alasan-alasan pemicu instabilitas politik dalam negeri. Kondisi instabilitas yang terus-menerus terjadi dapat membawa negara dalam kondisi krisis hingga terjadi pergolakan politik. Pada awal tahun 2011, pergolakan politik yang diakibatkan kelemahan pemerintah negara terjadi di sebagian besar kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah.¹

Arab Spring diawali di Tunisia ketika seorang pedagang kaki lima Mohamed Bouazizi² membakar diri sebagai bentuk protes ketidakadilan rezim Ben Ali dan berbuntut demonstrasi yang memaksa Presiden Ben Ali³ turun dari kekuasaannya.

¹ Tamburak, Apriadi. 2011. *“Revolusi Timur Tengah Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara-Negara Timur Tengah.”* Yogyakarta: NARASI. Hal.10.

² Adalah seorang pedagang kaki lima di Tunisia yang membakar dirinya pada Januari 2011, sebagai protes terhadap penyitaan barang dagangannya dan juga pelecehan dan penghinaan yang dilakukan oleh seorang pejabat kota dan ajudannya. The Editors of Encyclopaedia Britannica. 2020. *“Mohamed Bouazizi”* (<https://www.britannica.com/biography/Mohamed-Bouazizi>) diakses pada 16 Juli 2020.

³ Zainal Abidin bin Ali (bahasa Arab: زين العابدين بن علي , Zayn al-'Ābidīn bin 'Alī; lahir 3 September 1936 – meninggal 19 September 2019 pada umur 83 tahun), adalah politikus Tunisia yang menjabat Presiden Tunisia sejak 1987 hingga digulingkan tahun 2011. Bin Ali diangkat sebagai Perdana Menteri pada Oktober 1987. Ia naik menjadi presiden pada tanggal 7 November 1987 melalui kudeta damai yang menggulingkan Habib Bourguiba, presiden sebelumnya yang dianggap tidak kompeten. Bin Ali kemudian selalu terpilih lagi dengan perolehan suara di atas 90%; ia terakhir kali memenangi pemilu pada tanggal 25 Oktober 2009. The Editors of Encyclopaedia Britannica.

Penyebaran informasi melalui media massa dan media sosial mendorong tuntutan perubahan rezim menjalar ke negara-negara Arab lainnya. Presiden Libya Muammar Khadafi⁴ jatuh dan terbunuh setelah meletus perang saudara di negara ini. Kemudian, Maroko merespon tuntutan publik dengan melakukan pemilu multi partai pada 27 November 2011. Hal yang sama dilakukan Aljazair dan Yordania. Sementara itu, negara-negara kaya seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Oman dengan pendekatan kesejahteraan berusaha bertahan dari tuntutan perubahan politik.⁵

Mesir banyak berkembang dalam kegagalan yang didalam sistem pemerintahannya bukan hanya rezim korup tetapi rezim otoriter pun dialami oleh rakyat Mesir dimasa pemerintahan Presiden Husni Mubarak. Tanggal 11 Februari 2011 yang lalu merupakan tanggal yang bersejarah bagi negara dan masyarakat Mesir. Pasalnya pada tanggal tersebut Presiden Mesir bersedia untuk mundur dari kursi kepresidenannya setelah berkuasa hampir selama 32 tahun. Reformasi dan demokratisasi yang ada di Mesir ini tidak salah lagi membawa banyak pengaruh bagi negara sekitar yang menjadikanya sebagai teladan dalam reformasi seperti

2019. "Zine al-Abidine Ben Ali" (<https://www.britannica.com/biography/Zine-al-Abidine-Ben-Ali>) diakses pada 16 Juli 2020.

⁴ Adalah seorang tokoh revolusi dan politikus asal Libya. Ia berkuasa di Libya sebagai Kepala Revolusioner Republik Arab Libya dari tahun 1969 hingga 1977, dan kemudian sebagai "Pemimpin dan Penuntun Revolusi" Jamahiriyyah Arab Libya dari tahun 1977 hingga 2011. Ia awalnya memperjuangkan nasionalisme dan sosialisme Arab, tetapi kemudian mengikuti ideologinya sendiri yang disebut Teori Internasional Ketiga. Khadafi meninggal akibat luka peluru yang ditimbulkan saat ia berada di tengah baku tembak. Berdasarkan pengakuan saksi lainnya, pemberontak telah menembak Khadafi di perutnya dalam perang saudara yang terjadi selama revolusi. Biography.com. 2019. "Muammar al-Qaddafi Biography" (<https://www.biography.com/political-figure/muammar-al-qaddafi>) diakses pada 16 Juli 2020.

⁵ Sahide, Ahmad & Bambang Cipto & Siti Setiawati & Syamsul Hadi. 2015. "The Arab Spring: Membaca Kronologi dan Faktornya Penyebabnya" Jurnal Hubungan Internasional. Vol. 4. (https://www.researchgate.net/publication/311097151_The_Arab_Spring_Membaca_Kronologi_dan_Faktornya_Penyebabnya) diakses pada 16 Juli 2020.

yang terjadi di Libya dan Tunisia. Menurut laporan dari BBC⁶ pada tanggal yang sama, belum diketahui faktor apa yang mendorong Mubarak sehingga ia bersedia mengundurkan diri, namun yang pasti reformasi yang terjadi di Mesir ini melibatkan banyak aspek dan aktor baik internasional maupun domestik, sehingga akan sangat panjang jika menjelaskan hubungan antar satu aspek dengan aspek lainnya. Penulis disini akan mencoba untuk fokus pada faktor yang berperan cukup signifikan dalam kejatuhan rezim Mubarak, yakni pihak oposisi dan militer.

Bukan hal yang sulit kiranya untuk menebak bahwa pihak militer-lah yang paling berpengaruh dan memegang kekuasaan di Mesir. Terbukti karena Mubarak sendiri memiliki *'background'* kemiliteran dan banyak orang-orang militer yang ditempatkannya di posisi-posisi tertentu guna mengamankan legitimasinya sebagai pemimpin Mesir. Menurut Khalil⁷, seorang pengamat demokrasi di Timur Tengah dan editor eksekutif majalah mingguan Watani International:

“As a matter of fact, the armed forces believe they have “inherited” Egypt since the revolution of 1952 and act as legitimate owners rather than guardians. They have no quarrel with the Islamists—quite the opposite in some cases—however, this is a power conflict and not an ideological one. The armed forces will not concede power, and would wage war on any potential competitors.”

Mesir sejak revolusi tahun 1952, oleh karena itu mereka bertindak sebagai pemilik Mesir yang berlegitimasi sehingga bukan hal aneh jika militer kerap kali menyerang pihak kompetitor yang berpotensi merebut kekuasaan dari tangannya.

⁶ BBC. 2011. *“Warga Mesir Siapkan Unjuk Rasa Besar”* (http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/01/110125_egyptdemo.shtml) diakses pada 27 April 2017.

⁷ Khalil, Magdi, 2006. *“Egypt’s Muslim Brotherhood and Political Power: Would Democracy Survive?”*. (<http://www.rubincenter.org/2006/03/khalil-2006-03-03/>) diakses pada 27 April 2017.

Sehingga menurut BBC,⁸ diperkirakan 300 korban jiwa telah meninggal selama 18 hari demonstrasi di Mesir. Demonstrasi ini pun juga dibantu oleh Ikhwanul Muslimin yang kontra terhadap Barat. Demonstrasi ini secara besar-besaran dilakukan di *Tahrir Square*, Kairo. Pergolakan politik di Mesir ini pada dasarnya dikenal sebagai salah satu bagian dari gelombang “*Arab Spring*”⁹ yang terjadi dinegara-negara kawasan Arab dan Timur Tengah.

Masyarakat Mesir menuntut terjadinya revolusi pemerintahan dan demokratisasi demi terwujudnya kehidupan mereka yang lebih baik. Aksi-aksi masyarakat untuk menggulingkan rezim Mubarak di Mesir nyatanya dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat, baik pria maupun perempuan. Berbagai macam cara dilakukan oleh masyarakat Mesir untuk menggulingkan Husni Mubarak agar mencopot jabatannya sebagai Presiden. Fenomena ini mengungkap keterlibatan perempuan yang cukup signifikan dalam aksi demonstrasi Mesir ini tentunya menarik perhatian. Sebagai negara Muslim yang cukup fleksibel dalam pemberian hak-hak pada perempuan, keterlibatan perempuan dalam demonstrasi ini mengindikasikan keganjilan pada segala kebebasan yang telah dinikmati oleh perempuan Mesir. Kemudian penulis mengkhususkan terhadap perempuan dalam situasi perang ataupun konflik, peranan perempuan sering kali ‘ditinggalkan’ dan

⁸ BBC. 2011. “*Kronologi Unjuk Rasa Mesir*”. (http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/02/110211_timeline.shtml) diakses pada 27 April 2017.

⁹ *Arab Spring* (Musim Semi Arab) merujuk pada proses perubahan politik di Dunia Arab sejak tahun 2011. *Arab Spring* ditandai dengan demonstrasi massa secara masif dan diakhiri dengan tumbangannya beberapa rezim yang sudah berkuasa selama puluhan tahun. Kegagalan *Arab Spring* ditunjukkan dengan harapan rakyat Timur Tengah yang tidak terwujud. Keinginan lepas dari kediktatoran rezim (*dictatorship regime*) yang zalim justru menghadirkan rezim diktator baru sebagaimana yang terjadi di Mesir. Manfreda, Primoz. 10 February 2017. “*Definition of The Arab Spring: Middle East Uprisings in 2011*”. (<http://ww.thoughtco.com/definition-of-the-arab-spring-2353029>).

cenderung di anggap sebagai aktor yang hanya mengurus urusan rumah tangga. Terdapat dua persepsi mengenai peranan perempuan dalam situasi konflik. Pada satu sisi, perempuan merupakan target atau korban dari pada konflik tersebut, seperti misalnya tragedi pemerkosaan ataupun ancaman terhadap pemerkosaan yang sering di jadikan sebagai instrumen atau alat dari perang.¹⁰ Akan tetapi di sisi lain, perempuan juga di pandang sebagai “*political innocents*”, sehingga perempuan memiliki akses gerak yang lebih luas baik dalam urusan rumah tangga maupun urusan mereka di lingkup sosial dan politik. Hal ini menempatkan perempuan dalam posisi istimewa, yang mana mereka dapat menegosiasikan perdamaian antara pihak yang bertikai atau bahkan membentuk aliansi melewati batas-batas sosial dan politik.

Alasan-alasan dibalik perjuangan yang tersebar luas demi emansipasi perempuan Mesir. Revolusi melawan kekuatan-kekuatan kolonial mempergunakan kemampuan dan kekuatan perempuan. Cita-cita humanisme dan hak pilih universal tersebar lewat sistem komunikasi yang berkembang saat ini. Tujuan utamanya cukup jelas, kaum perempuan di Mesir dengan gigih ambil bagian dalam perjuangan untuk memberikan suara yang sama, status hukum, kesempatan akan pendidikan dan kerja.¹¹

¹⁰ Guhathakurta, Meghna. 2004. “*The Chittagong Hill Tracts (CHT) Accord and After: Gendered Dimensions of Peace.*” Switzerland: United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD).

¹¹ *Ibid.*

1.2 Rumusan Masalah

Dimensi permasalahan yang melingkupi Mesir saat ini dikatakan sangat kompleks. Rezim Husni Mubarak yang telah berkuasa selama 30 tahun telah membentuk sebuah sistem politik dan pemerintahan otokrasi yang olehnya didengungkan sebagai jalan demokrasi. Perempuan memegang peranan penting dalam penghentian kekerasan dan penyelesaian konflik, terutama melalui cara tidak resmi di luar meja perundingan perdamaian atau *soft power*. Namun, peran perempuan itu kurang diakui dan tidak mendapatkan perhatian sehingga penyelesaian konflik dan segala persoalan pascakonflik tidak tuntas terselesaikan. Padahal, keunggulan perempuan dalam menggunakan *soft power* itu terbukti lebih efektif. Maka dari itu dalam tulisan ini, pertanyaan yang berusaha dijawab oleh penulis adalah **“Bagaimana Gerakan Feminisme Mesir dalam Revolusi Mesir 2011?”** Dengan demikian penulis akan membahas mengenai gerakan-gerakan feminisme dalam revolusi Mesir pada tahun 2011 yang berujung pada berakhirnya masa pemerintahan Husni Mubarak dan apa saja yang dihasilkan dari revolusi tersebut terhadap perempuan.

1.3 Tujuan Penelitian

Ketertarikan penulis untuk membahas judul diatas dan melakukan penelitian memiliki tujuan yakni, untuk mengetahui gerakan-gerakan feminisme yang terjadi kepada masyarakat Mesir didalam revolusi dan sesudah revolusi tahun 2011.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap melalui penelitian ini akan berguna yakni, sebagai bahan referensi informatif bagi pihak-pihak akademisi yang memiliki fokus terhadap kajian Timur Tengah khususnya Mesir dan bagi pembaca dapat memahami gerakan feminisme dan latar belakang terjadinya revolusi Mesir dan apa saja yang dihasilkan dari revolusi tersebut terhadap perempuan.

1.5 Kerangka Penelitian

1.5.1 Landasan Teori

1.5.1.1 Gerakan Feminisme

Teori feminis merupakan label generik untuk perspektif atau kelompok teori yang mengeksploitasi makna konsep-konsep *gender*. Teori feminis mengamati bahwa banyak aspek kehidupan terlepas dari seks biologis dipahami dalam kualitas *gender* termasuk bahasa, kerja, peran keluarga, pendidikan, serta sosialisasi.

Teori feminis bertujuan untuk membongkar kekuasaan dan batas-batas pembagian kekuasaan itu. Kekuasaan itu adalah penggolongan kelas atau status berdasarkan jenis kelamin (*genderisasi*). Teori feminis menekankan sifat opresif dan relasi *gender*. Sifat opresif adalah sifat yang keras dan menekan.¹²

Feminisme mencoba membongkar akar ketertindasan perempuan dan menawarkan ideologi alternatif yakni: sosialis. Penindasan terhadap perempuan

¹² Weber, Chyntia. 2010. "*Chapter 5: Gender*". Dalam *International Relations Theory: A Critical Introduction*. New York: Routledge. Hal. 85

tidak akan berakhir selama masih terus diterapkannya sistem kapitalisme. Inilah yang dikatakan sebagai peminggiran peran perempuan sebagai bagian dari produk sosial, politik, dan ekonomi yang berhubungan dengan keberadaan kapitalisme sebagai suatu sistem. Inilah penindasan yang berakar pada keberadaan kelas-kelas dalam masyarakat. Feminisme merupakan salah satu teori yang dapat digunakan untuk menggambarkan ketimpangan gender, dimana teori feminis ini mempunyai pemikiran bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kapasitas yang sama, mempunyai nalar yang dapat digunakan untuk berpikir, bahwa ketimpangan gender adalah akibat pola seksis, budaya patriarki dari divisi kerja, dan kesetaraan gender dapat diatasi dengan jalan mengubah divisi kerja, dengan cara pemolaan ulang institusi-institusi (bidang pekerjaan, keluarga, pendidikan, dan media,) untuk mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memenuhi keinginan dan mendapat kebebasan dalam mengaktualisasikan dirinya. Sejarah telah menunjukkan bahwa feminis menuntut adanya kesetaraan gender.

Feminis mampu memperlihatkan strategi yang akan menghasilkan kesetaraan gender melalui peluang ekonomi, pendidikan untuk perempuan, dan menghilangkan diskriminasi kerja, selain itu dengan adanya kesetaraan gaji membuat kesetaraan gender dapat tercipta.¹³ Akar daripada feminisme dikatakan bahwa pemikiran politis liberal mempunyai sifat dasar yakni menempatkan manusia pada keunikan tersendiri dibanding makhluk lainnya, yakni kemampuan untuk bernalar dengan menekankan aspek moral atau aspek prudential.¹⁴ Dengan

¹³ Ritzer, George. 2003. *Teori Sosiologi Modern: Teori Feminisme Modern.* Kencana:Jakarta. Hal. 403.

¹⁴ Tong, Rosemarie Putnam. 2004. *Feminis Thought*. Jelasutra:Jakarta. Hal. 15.

kata lain prinsip feminisme adalah perempuan dan laki-laki mempunyai kemampuan untuk bernalar, sehingga mereka mempunyai hak-hak dan kesempatan yang sama untuk memajukan dirinya. Feminis melihat masih terjadi penindasan yang dilakukan terhadap perempuan, belum terpenuhinya hak-hak perempuan, kesempatan, dan kebebasan karena ia perempuan, itu berarti perempuan masih mengalami penindasan, sekalipun perempuan telah mendapatkan posisi puncaknya namun tidak dapat diapresiasi secara penuh oleh lingkungan atau orang sekitarnya. Dalam pemikiran utama feminis telah terbagi menjadi dua golongan, yakni kaum liberal klasik yang menggambarkan negara ideal, ialah negara yang melindungi kebebasan sipil (hak milik, hak memilih, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan untuk berbeda, kebebasan berserikat. Sedangkan bagi kaum liberal yang berorientasi pada kesejahteraan (elagatarian), negara ideal ialah negara yang lebih berfokus pada keadilan ekonomi, kebebasan sipil. Dua paham ini kemudian menjadi arus pemikiran utama pada sekitar abad ke 18-19. Tujuan utama dari feminisme adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan peduli tempat kebebasan berkembang, karena hanya dalam kondisi seperti itu perempuan dan laki-laki dapat mengembangkan diri.

Arus pemikiran feminis terbagi menjadi 3 fase dalam perkembangannya, yakni fase pertama pemikiran feminis abad ke-18 yang fokus membicarakan tentang pendidikan yang setara bagi laki-laki dan perempuan, fase kedua pemikiran feminis abad ke-19 yang fokus membicarakan mengenai hak politik dan kesempatan ekonomi yang, dan fase ketiga gerakan feminis abad ke-20 yang fokus membicarakan perempuan membutuhkan kesempatan ekonomi dan juga kebebasan

sipil untuk mendapatkan kebebasan yang sesungguhnya.¹⁵ Susan Wendel dalam tulisan artikel, mengatakan bahwa “Feminis bukan berupaya menjadi sosialis dengan tuntutan program-program bantuan pemerintah. Feminis hanya ingin adanya organisasi ekonomi dan kesetaraan dalam distribusi kekayaan, sebab salah satu tujuan feminis adalah kesempatan yang adil”.¹⁶

Dalam pemikiran Mary Wollstonecraft, terkait sifat utama manusia yang mempunyai kapasitas untuk bernalar, ia berpendapat bahwa jika manusia memiliki kapasitas nalar, maka laki-laki ataupun perempuan pasti juga sama memiliki kapasitas tersebut. Sehingga masyarakat wajib memberikan pendidikan yang sama, karena semua manusia berhak mendapatkan kesempatan yang setara untuk mengembangkan kapasitas nalar dan moralnya, sehingga mereka bisa menjadi manusia yang utuh. Mary Wollstonecraft mendorong perempuan untuk menjadi pembuat keputusan yang otonom, jalan menuju pemikiran yang otonom hanya didapat dari pendidikan yang setara. Wollstonecraft mencoba menghadirkan visi seorang perempuan yang memiliki kekuatan fisik dan pikiran, dan merupakan budak atas hasratnya, bukan budak suami maupun anak-anaknya. Wollstonecraft menginginkan perempuan menjadi “*personhood*” (manusia secara utuh), perempuan adalah bukan “sekedar alat” dan “mainan laki – laki” tetapi perempuan adalah “suatu tujuan”, agen bernalar, yang harga dirinya ada dalam kemampuannya untuk menentukan nasibnya sendiri.¹⁷ Seratus tahun kemudian memasuki abad ke-

¹⁵ Arivia, Gadis. 2003. “*Filsafat Berperspektif Feminis*”. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan

¹⁶ Wendel, Susan. 1981. “*A defense of liberal feminism*”. Wiley: Hypatia. Inc. Hal. 66.

¹⁷ Monroe, Julie A. 1987. “*Criticism: A Feminist Vindication Of Mary Wollstonecraft*”. Vol 8. Issue 1. Iowa Journal Of Literary Studies 8. Hal.143-152. (<http://ir.uiowa.edu/ijls/vol8/iss1/34/>)

19, John Stuart Mill dan Harriet Taylor mulai menyuarakan pemikiran mereka bahwa untuk memaksimalkan kegunaan total (kebahagiaan/kenikmatan) adalah dengan membiarkan setiap individu untuk mengejar apa yang mereka inginkan, selama mereka tidak saling membatasi atau menghalangi didalam proses pencapaian tersebut. Contoh: ketika seorang perempuan ingin mencapai kesuksesan dalam karirnya diranah publik, tidak ada seorangpun yang boleh untuk membatasi dan menghalangi keinginan tersebut, tentunya dengan resiko dan tanggung jawab nalar moralitas yang melekat pada diri perempuan itu untuk mengambil keputusan secara otonom.

Mill berpendapat bahwa setelah perempuan mendapat pendidikan penuh dan hak pilih, kebanyakan perempuan akan memilih untuk berada didalam ranah pribadi, tempat fungsi primer mereka adalah untuk “memperindah dan mempercantik diri”, daripada untuk “mendukung kehidupan”.¹⁸ Sebaliknya Taylor berargumentasi bahwa tugas perempuan dan juga tugas laki-laki adalah untuk “mendukung kehidupan”. Taylor dalam tulisannya di *Enfranchisement* perempuan mempunyai pilihan ketiga yaitu menambahkan karier atau pekerjaan kedalam peran serta tugas domestik dan maternalnya. Meskipun perempuan telah mendapat haknya untuk menambahkan karier atau pekerjaan kedalam perannya, namun kesetaraan dengan laki – laki juga masih belum dapat tercapai, seperti yang dikatakan oleh Mill pada tahun 1832, bahwa kesetaraan ekonomi perempuan akan

¹⁸ Mendus, Susan. 1994. *John Stuart Mill and Harriet Taylor on Women and Marriage*. University of York. Hal: 287-299.(<https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/2FED041CB55FEA0267E14E5C9B82B264/S0953820800001643a.pdf/div-class-title-john-stuart-mill-and-harriet-taylor-on-women-and-marriage-div.pdf>) diakses pada 3 Mei 2017.

menekan perekonomian, dan kemudian menekan upah menjadi lebih rendah. Namun Taylor, menegaskan bahwa perempuan yang sudah menikah tidak dapat menjadi orang yang sungguh-sungguh setara dengan suaminya, kecuali ia mempunyai kepercayaan diri dan rasa bahwa ia berhak atas kesetaraan itu yang muncul dari kontribusi “material untuk menopang keluarga”. Taylor bersikeras bahwasanya penting untuk perempuan bekerja, meskipun upah/pendapatan yang dihasilkan tidak seberapa/lebih rendah dari suami, karena istri harus menjadi partner dan istri harus mempunyai penghasilan dari pekerjaan diluar rumahnya.¹⁹

Pemikiran feminis abad ke-20 berfokus pada perlakuan perempuan dan laki-laki secara sama atau mungkin berbeda. Betty Friedan, salah satu presiden dari National Organization for Women (NOW) dalam *The Feminist Mystique* mengatakan bahwa perempuan kontemporer perlu mendapat pekerjaan yang bermakna dalam pekerjaan disektor publik secara penuh waktu. Ketidakhadiran ibu dirumah akan memungkinkan suami dan anak-anak menjadi lebih mandiri, mampu memasak makanan mereka sendiri, dan dapat mencuci baju mereka sendiri.²⁰ Permasalah kemudian timbul perempuan mengalami peran ganda sebagai seorang ibu atau istri, ibu yang harus merawat anak-anaknya, dan istri yang harus membantu dan bersinergi dengan laki-laki untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Seperti

¹⁹ Mill, Harriet Taylor. 2015. “Excerpt From “Enfranchisement Of Women,” *Westminster Review (July 1851): 295-96. Reprinted In Ann P. Robson And John M. Robson, Eds., Sexual Equality: Writings By John Stuart Mill, Harriet Taylor Mill, And Helen Taylor.1994, 178-203*”. Toronto: University Of Toronto Press. (<http://womhist.alexanderstreet.com/awrm/doc15.htm>) diakses pada 3 Mei 2017.

²⁰ Friedan, Betty. 1963. “*The Feminine Mystique*”. New York: W. W. Norton & Company, Inc. Hal 15-32. (<https://nationalhumanitiescenter.org/ows/seminars/tcentury/FeminineMystique.pdf>) diakses pada 3 Mei 2017.

dikatakan Friedan tahun 1980-an,²¹ Bersama dengan laki – laki perempuan mungkin dapat mengembangkan jenis nilai – nilai sosial, gaya kepemimpinan, dan struktur institusional yang akan memungkinkan kedua gender untuk mencapai pemenuhannya, baik di dunia publik maupun privat.

Arah Feminisme yang berkeinginan untuk membebaskan perempuan dari peran gender yang opresif yaitu dari peran-peran yang digunakan sebagai alasan atau pembenaran untuk memberikan tempat yang lebih rendah, atau tidak memberikan tempat sama sekali, bagi perempuan, baik dalam akademi, forum, maupun pasar. Pemerintah mempunyai peran penting dalam kegiatan feminis dan ikut bertanggungjawab untuk meniadakan diskriminasi baik seksual maupun penghasilan dan ikut bertanggung jawab untuk membuat perempuan di negara tersebut aman dari pelecehan seksual, pemerkosaan dan kekerasan yang sering dialami perempuan.²²

Beberapa penelitian dilakukan dengan menggunakan teori feminisme untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang feminisme, salah satu diantaranya adalah penelitian dalam bidang sastra yakni untuk menganalisis karakter seorang tokoh novel dengan pemeran utama perempuan seperti penelitian yang dilakukan untuk menganalisis novel *'Relax'* karya Alexa Hennig Von Lange. Penelitian dilakukan untuk membahas subordinasi pria terhadap perempuan dan stereotip gender, selain

²¹ Friedan, Betty. 1986. *"The Second Stage"*. Summit books reprinted by permission of Curtis Brown, Ltd. Hal 555. (<http://www.nytimes.com/books/99/05/09/specials/friedan-stage.html>) diakses pada 3 Mei 2017.

²² Ningsih, Dewi Wahyu. 2015. *"Feminis Liberal"*. Universitas Airlangga: Surabaya. (http://dewi-w-n-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-139536-%20Sosial%20Politik-Feminis%20Liberal.html) diakses pada 3 Mei 2017.

itu teori feminis juga digunakan untuk meneliti masalah penindasan yang terjadi terhadap perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bahwa perempuan telah mengalami dalam situasi dan posisi yang berbeda termasuk pengalaman ketertindasan yang juga berbeda sehingga tidak dapat didefinisikan secara universal tetapi justru diperhatikan keterbedaannya.²³ Keterpurukan perempuan bukan karena perkembangan teknologi, bukan karena perempuan lemah secara mental dan tenaga (sehingga harus dilindungi oleh lelaki), bukan karena sebab-sebab lain, tetapi karena munculnya kelas-kelas sosial. Pada prakteknya, perjuangan pembebasan perempuan tidak bisa dipisahkan dari perjuangan sosialisme, karena secara sistematis kapitalisme dengan alat-alat ideologinya dan alat-alat kerasnya, melakukan penindasan terhadap semua sektor masyarakat. Kapitalisme secara frontal memerlukan penindasan terhadap pekerja (sehingga seorang buruh perempuan, harus mengalami dua lapis penindasan: baik sebagai buruh maupun sebagai perempuan), memerlukan perusakan lingkungan hidup, memerlukan rasisme, memerlukan seni dan hiburan yang membodohkan masyarakat dan memerlukan praktek neoliberalisme dan imperialisme sebagai jalan keluar dari krisis yang terus melilitnya. Inilah contoh-contoh yang menjelaskan mengapa perjuangan perempuan harus dilakukan dengan persatuan yang kokoh dengan berbagai sektor masyarakat lain, utamanya dengan kelas pekerja. Perjuangan perempuan tak bisa terpisah secara sektoral dan eksklusif, karena akan melemahkan persatuan kokoh dari masyarakat yang tertindas. Paham ini memberi

²³ McCarthy, Margaret. 2011. "Feminism and Generational Conflicts in Alexa Hennig von Lange's *Relax*, Elke Naters's *Lügen*, and Charlotte Roche's *Feuchtgebiete*," *Studies in 20th & 21st Century Literature*: Vol. 35: Iss. 1, Article 5. Hal: 1-17 (<http://dx.doi.org/10.4148/2334-4415.1739>) diakses pada 3 Mei 2017.

gambaran bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan haruslah diterima dan dipelihara. Mereka menganggap bahwa masyarakat telah diatur untuk saling berhubungan diantara keduanya. Lebih jelasnya paham ini menolak adanya otoritas.

1.5.1.2 Revolusi

Kehidupan merupakan siklus yang panjang, didalamnya ada manusia berperan sebagai aktor utamanya. Manusia hidup dalam waktu ke waktu, seiring berjalannya siklus kehidupan yang terus berputar, selalu ada perkembangan, membawa perubahan dan menciptakan sejarah akan dirinya. Manusia adalah makhluk yang memiliki rasa kepuasan yang tak terbatas, kebutuhan yang tak ada habisnya, rakus dan saling ketergantungan. Oleh karena itulah kehidupan manusia senantiasa penuh dengan keinginan, harapan dan pertimbangan. Keinginan untuk memenuhi kepuasannya, harapan yang selalu ingin kehidupannya baik dan mempertimbangkan segala sesuatu secara rasional ataupun tidak. Namun, ketika keinginan tidak bisa tercapai, harapan tak sesuai dengan kenyataan dan pertimbangan sangat sulit untuk memilih apa yang akan dipilih maka akan terciptalah konflik, baik itu konflik dalam dirinya sendiri maupun orang lain, menjadikan kehidupan tak selalu berjalan mulus. Revolusi yang digunakan dalam penelitian ini adalah suatu bentuk perubahan yang bersifat radikal atau fundamental yang terjadi secara menyeluruh atau dalam bidang tertentu dalam jangka waktu yang cepat dan tiba-tiba yang menyangkut masalah kemasyarakatan dan ketatanegaraan yang dilakukan oleh sekelompok pihak dan selalu mengalami benturan.

Dahrendorf, melalui karyanya *Class and Conflict Class in Industrial Society* berupaya memodifikasi konsep teori konflik Marx. Ia beranggapan bahwa konsep-konsep konflik Marx hanya berlaku pada saat masyarakat kapitalis saja, tetapi tidak pada masyarakat pasca kapitalis atau ia meyebutnya dengan masyarakat modern industrial. Menurut Dahrendorf, konflik pada masyarakat modern industrial tidak hanya dalam konteks pemilik alat-alat produksi yang selalu disangkut-pautkan Marx dengan ekonomi, politik dan sosial. Sosiologi konflik mazhab positivis pada dasarnya melahirkan sosiologi konflik struktural. Beberapa kalangan menyebutkan sebagai aliran makro. Sehingga mazhab sosiologi konflik positivis bisa disebut sebagai sosiologi konflik makro. Ada dua ciri utama dalam mazhab ini: (1) Generalisasi teori yang bisa berlaku secara universal. (2) Melihat konflik sebagai bagian dari dinamika era struktural.²⁴

Keberadaan teori konflik muncul setelah fungsionalisme, namun sesungguhnya teori konflik sebenarnya sama saja dengan suatu sikap kritis terhadap marxisme Ortodoks. Seperti Ralf Dahrendorf yang membicarakan tentang konflik antara kelompok-kelompok terkoordinasi, (*Imperatively coordinated association*) dan buka analisis perjuangan kelas, lalu tentang elite dominan, daripada pengaturan kelas, dan manajemen pekerja daripada modal dan buruh.²⁵ Dahrendorf muda dikirim dikamp Nazi karena keanggotaannya sebagai anggota oposisi di sekolah menengah dan keterlibatannya dalam aktivitas politik. Dia merupakan anggota *free*

²⁴ Susan, Novri. 2009. "*Pengantar Sosiologi Konflik: Edisi Revisi*". Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Hal. 40.

²⁵ McQuerie, Donald. 1995. "*Reading in Contemporary Sociological Theory From Modernity to Post-Modernity*". New Jersey: Practice Hall. Hal. 66.

democratic dari parlemen regional Baden-Wutemberg Landtag dan parlemen West German Bundestag. Dahrendorf Menjadi anggota komisi komunitas Eropa yang bertanggung jawab di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, dan penelitian. Dahrendorf Menolak utopia teori fungsionalisme yang lebih menekankan konsensus dalam sistem sosial secara berlebihan. Wajah masyarakat menurutnya tidak selalu dalam kondisi terintegrasi, harmonis, dan saling memenuhi, tetapi ada wajah lain yang memperlihatkan konflik serta perubahan. Baginya pelembagaan melibatkan dunia kelompok-kelompok terkoordinasi (ICAs/ *Imperatively Coordinated Associations*), yang mewakili peran-peran organisasi yang dapat dibedakan. Organisasi beberapa kelompok peranan mempunyai kekuasaan memaksakan dari yang lainnya.²⁶

Bagi Dahrendorf konflik hanya muncul melalui relasi sosial dan sistem. Setiap individu atau kelompok yang tidak terhubung dalam sistem tidak mungkin terlibat dalam konflik. Dahrendorf menyebutkan sebagai “*integrated into a common frame of reference*”. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa unit analisis dalam sosiologi konflik adalah keterpaksaan yang menciptakan organisasi sosial bisa bersama sebagai sistem sosial.²⁷ Hal ini tentu saja berlawanan dari tradisi fungsionalisme struktural yang melihat unit analisis sosiologi adalah konsensus diantara berbagai organisasi sosial sehingga memungkinkan berbagai kerjasama.²⁸

²⁶ McQuerrie, Donald. Op. Cit. Hal. 67.

²⁷ Dahrendorf, Ralf. 1959. “*Class and Class Conflict in Industrial Society*”. California: Stanford University Press. Hal. 164-165.

²⁸ Susan, Novri. Op. Cit. Hal 67.

Dahrendorf memahami relasi dalam struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan. Dahrendorf mendefinisikan kekuasaan sebagai kewenangan yang melekat secara legal akibat dari posisi individu di dalam sistem dan struktur sosial. Kewenangan yang mampu menunjukkan individu lain tanpa kekuatan perlawanan.²⁹ Menurut Wallace dan Wolf, esensi kekuasaan yang dimaksud oleh Dahrendorf kekuasaan kontrol dan sanksi sehingga memungkinkan mereka yang memiliki kekuasaan memberi berbagai perintah dan mendapatkan apa yang mereka inginkan dari mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Jadi Dahrendorf melihat konflik kepentingan menjadi fakta tak terhindarkan dari mereka yang memiliki kekuasaan dan tidak memiliki kekuasaan. Kekuasaan adalah *lasting source of fiction*.³⁰

Kekuasaan dalam masyarakat modern dan industrial bisa diterjemahkan sebagai wewenang (*authority*). Model kekuasaan Dahrendorf ini tampaknya dipengaruhi oleh tipe ideal kekuasaan dari Max Weber yang menyebutkan wewenang legal formal sebagai sumber kekuasaan masyarakat modern.³¹ Dahrendorf melihat wewenang adalah: (1) relasi wewenang yaitu selalu relasi antara superior dan Sub-ordinasi (2) di mana ada relasi wewenang, kelompok superior selalu diharapkan mengontrol perilaku kelompok subordinasi melalui permintaan dan perintah serta peringatan dan larangan (3) berbagai harapan tertanam relatif permanen dalam posisi sosial dari pada karakter Individual (4)

²⁹ Dahrendorf, Ralf. Op. Cit. Hal. 166.

³⁰ Wallace, dan Wolf. 1995. "*Reading in Contemporary Sociological Theory From Modernity to Post Modernity*". New Jersey: Practice Hall. Hal. 145.

³¹ Susan, Novri. Op. Cit. Hal 42.

dengan keberadaan fakta ini (kekuasaan superordinasi), mereka selalu melibatkan spesifikasi subjek perorangan untuk mengontrol dan spesifikasi dari ruang sosial (*spheres*) yang kontrol mungkin dilakukan (5) wewenang menjadi hubungan terlegitimasi, tanpa adanya proses dengan perintah-perintah otoritatif dapat diberi sanksi; sesungguhnya ini merupakan fungsi sebenarnya dari sistem legal untuk mendukung pemberlakuan wewenang yang memiliki legitimasi.³²

Saat kekuasaan merupakan tekanan satu sama lain, kekuasaan dalam hubungan kelompok-kelompok terkoordinasi ini memelihara menjadi *legitimate*, dan oleh sebab itu dapat dilihat sebagai hubungan “*authority*”, beberapa posisi mempunyai hak normatif untuk menentukan atau memperlakukan yang lain.³³ Sehingga tatanan sosial menurut Dahrendorf, dipelihara oleh proses penciptaan hubungan wewenang dalam berbagai jenis tipe kelompok terordinasi yang ada hingga seluruh lapisan sistem sosial. Kekuasaan dan wewenang adalah sumber langka yang membuat kelompok saling bersaing dan berkelahi. Dahrendorf menyebutkan teori ini sebagai ‘teori koersi struktur sosial’.³⁴ ICAs muncul melalui suatu proses sosiologis yang sistematis. Dalam suatu wilayah sosial, seperti suatu perusahaan, mereka yang berada pada posisi subordinat atau sebagai *the rules class* menyadari ketertindasan mereka. Namun mereka masih belum memiliki kepentingan untuk mengubah posisi subordinat itu. Pada dasarnya mereka hanya memiliki kepentingan semu (*latent interest*). Kepentingan semu berada di level

³² Dahrendorf, Ralf. Op. Cit. Hal. 166-167.

³³ Turner, H. Jonathan. 1978. “*The Structure of Sociological Theory*”. Homewood Illionis: The Dorsey Press. Hal. 144.

³⁴ Dahrendorf, Ralf. Op. Cit. Hal. 173.

individu, tersimpan di bawah sadar. Namun kepentingan semu ini tersebar pada mereka yang merasa tertindas sebagai kelompok koordinasi sehingga menciptakan kelompok semu pula (*Quasi Group*).³⁵

Kepentingan semu dari kelompok semu ini menjadi kepentingan nyata (*Manifest Interest*) tatkala ada proses penyadaran yang dilakukan oleh beberapa orang yang terlebih dahulu mengerti kepentingan yang harus diperjuangkan. Mereka menciptakan kelompok yang benar-benar sadar pada kepentingan bersama dan perlu diperjuangkan. Proses ini menumbuhkan bentuk kesadaran pada kepentingan (*Interest Group*), (ICAs) yang siap melakukan gerakan perlawanan terhadap posisi dominan kelompok terorganisasi lainnya. Seperti kelompok terorganisasi buruh terhadap kelompok terorganisasi pengusaha.³⁶ Namun Dahrendorf memberi beberapa kondisi sosiologis agar formasi kepentingan laten bisa menjadi kelompok kepentingan manifest, yaitu: (1) dalam kelompok laten terdapat pemimpin yang berani berhubungan dengan konflik; (2) kelompok memiliki ideologi konflik; (3) para anggota kelompok laten memiliki kebebasan untuk mengorganisasi konflik. Refleksikan kondisi ini pada masa orde baru; dan (4) memiliki anggota yang komitmen dan berkomunikasi di antara sesama.³⁷

Resolusi dalam konflik antara kelompok itu ialah redistribusi kekuasaan atau wewenang, kemudian menjadikan konflik itu sebagai sumber perubahan dalam sistem sosial. Selanjutnya sekelompok peran baru memegang kunci kekuasaan dan

³⁵ Susan, Novri. Op. Cit. Hal 43.

³⁶ Dahrendorf, Ralf. Op. Cit. Hal. 178-179.

³⁷ Dahrendorf, Ralf. Op. Cit. Hal. 472.

wewenang dan yang lainnya dalam posisi bawahnya yang diatur. Redistribusi kekuasaan dan wewenang merupakan pelembagaan dari kelompok peranan baru yang mengatur (*ruling class*) versus peranan yang diatur (*ruled class*), yaitu dalam kondisi khusus kontes perebutan wewenang akan kembali muncul dengan inisiatif kelompok kepentingan yang ada, dan dengan situasi kondisi yang berbeda. Sehingga kenyataan sosial merupakan siklus tak berakhir dari adanya konflik wewenang dalam berbagai jenis tipe kelompok terorganisasi dari sistem sosial.³⁸

Dahrendorf menyebutkan teori konfliknya sebagai sosiologi konflik dialektis yang menjelaskan proses terus menerus distribusi kekuasaan dan wewenang di antara kelompok-kelompok terkoordinasi (ICAs). Sehingga kenyataan sosial, bagi Dahrendorf merupakan siklus tak berakhirnya dari adanya konflik wewenang dalam berbagai jenis tipe kelompok terkoordinasi dari sistem sosial. Anthony Giddens menyebutkan dinamika konflik ini sebagai dialektika kontrol sistem sosial (*Dialectic of control in social system*). Pihak pihak berkonflik dengan kekuasaan yang mereka miliki memiliki kapasitas transformatif, sehingga mereka mampu menciptakan negosiasi dan menciptakan suatu gerakan sosial untuk mencapai kepentingan yang menjadi tujuan mereka.³⁹ Pada umumnya konflik yang terjadi dalam masyarakat disebabkan karena adanya interaksi sosial yang telah dipengaruhi oleh struktur sosial dan terdapat kepentingan-kepentingan kelompok masing-masing didalamnya serta didominasi oleh pengaruh-pengaruh lain seperti ekonomi, sosial dan sebagainya. Konflik memang tidak terpisahkan dalam kehidupan

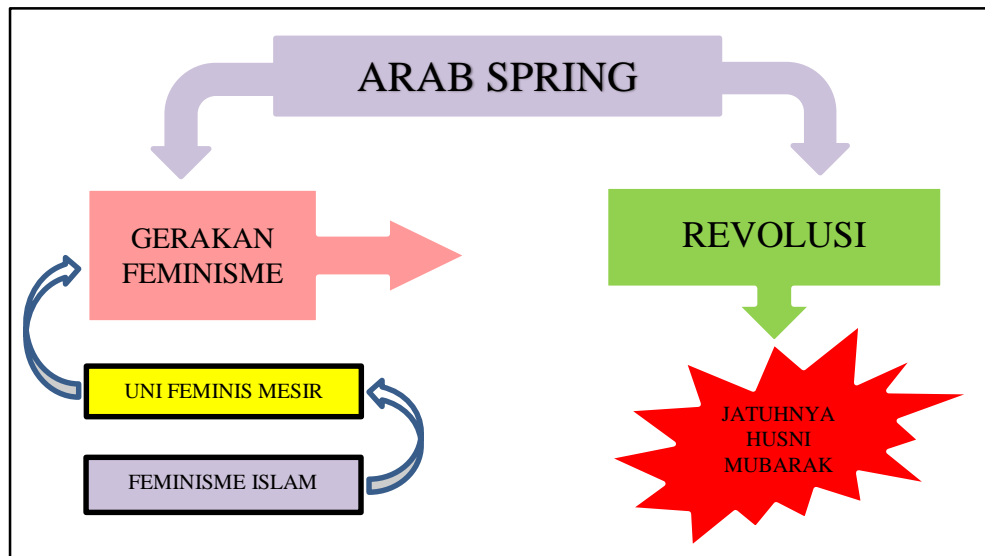
³⁸ Ibid.

³⁹ Giddens, Anthony. 1985. *The Nations-State and Violence*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press. Hal. 11.

masyarakat. Disisi lain, keberadaan konflik seharusnya memang ada, berfungsi membangun kesatuan yang lebih kokoh dalam suatu kelompok.

1.5.2 Sintesa Pemikiran

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan skema diatas, adanya serangkaian protes dan demonstrasi di seluruh Timur Tengah dan Afrika Utara telah dikenal luas dengan sebutan “Arab Spring” meski tidak semua pihak yang terlibat dalam protes merupakan bangsa Arab, dengan kesuksesan protes di Tunisia, gelombang kerusuhan menjalar ke Aljazair, Yordania, Mesir, dan Yaman, kemudian ke negara-negara lain dengan unjuk rasa terbesar dan paling terorganisir. Dalam pergerakan *arab spring* yang terjadi di Mesir, perempuan mengambil juga langkah untuk ikut berpartisipasi dalam pergolakan demokrasi yang terjadi. Dapat dilihat dari adanya Uni Feminis Mesir yang dibangun dengan visi misi feminisme islam yang mengawali gerakan feminisme di Mesir dan didasari juga dengan adanya pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilihat dari teori adanya pergerakan revolusi yang melahirkan konflik sosial sehingga menjadi salah satu alasan jatuhnya rezim Husni Mubarak.

1.6 Hipotesis

Dunia dibangun dengan cara berpikir dan dalam perspektif laki-laki, atau lebih tepatnya maskulinitas. Sementara perempuan dalam ideologi ini selalu dipandang sebagai eksistensi yang rendah dan ditempatkan sebagai makhluk domestik dan untuk kepentingan seksualitas laki-laki. Ideologi patriarkis telah muncul sejak abad yang amat ini dalam sejarah peradaban manusia. Diskriminasi yang terjadi sejak zaman dahulu dianggap sebagai titik awal penindasan tersebut. Ia dihidupkan secara terus-terus dari generasi ke generasi dan kurun waktu yang sangat panjang melalui teks-teks keagamaan dan mitologi-mitologi. Tak pelak, kondisi kebudayaan seperti ini kemudian melahirkan berbagai bentuk aturan, kebijakan, dan praktik-praktik diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yang acap kali dianggap sebagai situasi dan praktek wajar dan baik-baik saja.

Fokus dari feminisme dalam grupisme politik egoisme anarki internasional dan politik kekuasaan adalah memperjuangkan kesetaraan gender dalam lingkup pribadi dan publik. Tetapi dikarenakan adanya praktik otoriter dalam sistem pemerintahan tersebut sehingga negara yang menjadi aktor utama yang termasuk dalam aliran ini pun menjadi haus kekuasaan dan mengejar kepentingan pribadinya. Hal ini ditandai dengan pertentangan dalam intelektual ekstrim kanan dan ekstrim kiri yang melibatkan rezim pemerintahan yang berafiliasi atau berhubungan dengan imperium. Seperti yang dilakukan Husni Mubarak yang menjadi aktor tunggal dalam pemerintahannya dan jelas dipengaruhi oleh paham-paham radikal yang dibawa oleh sekutu-sekutunya negara-negara barat. Sehingga ini pulalah yang mengubah sistem pemerintahan mesir menjadi rezim otoriter di mana militer yang

menjadi penguasanya yang menciptakan dilema keamanan di mesir dan yang dilakukan mengenai dimensi gender dalam revolusi pemerintahan mesir 2011 lalu, pada dasarnya dapat dipahami pergerakan perempuan di mesir banyak juga dipengaruhi oleh pemikiran barat. Bahkan sebelum terjadinya revolusi, di bawah pemerintahan Mubarak pun perempuan secara hukum dan politik telah memiliki tingkat partisipasi dan kebebasan yang cukup baik jika dibandingkan dengan apa yang terjadi di wilayah-wilayah negara berbasis islam lainnya.

Hal ini sedikit banyak dipengaruhi oleh kehadiran dan pergerakan Suzanne Mubarak⁴⁰ yang merupakan istri dari Husni Mubarak untuk menciptakan keadilan perempuan. Namun demikian, nyatanya hanya dapat dirasakan oleh kalangan tertentu dan diskriminasi terhadap perempuan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam demonstrasi menuntut tergulingnya rezim Mubarak. Tetapi setelah melihat apa yang terjadi di dalam revolusi Mesir sesungguhnya banyak sekali perempuan perempuan yang menyuarakan untuk keadilan karena banyaknya diskriminasi yang dialami oleh perempuan perempuan Mesir. Banyak pula perempuan-perempuan yang berdemonstrasi menjadi korban kekerasan para militer Mesir banyak perempuan yang diseret, ditelanjangi, dipukuli, dan diserang di jalan, sesungguhnya

⁴⁰ Nama lahirnya Suzanne Saleh Sabet atau Thabet, lahir 28 Februari 1941, Umur 76 Tahun adalah istri Presiden Husni Mubarak yang sekaligus tampil sebagai Ibu Negara Mesir. Mempunyai *The Alexandria Regional Center for Women's Health and Development* atau biasa disebut sebagai *The Suzanne Mubarak Regional Center for Women's Health and Development* sebagai bentuk apresiasi atas kerja kerasnya untuk wanita Mesir tahun 2007. Aljazeera. 2011. "*Suzanne Mubarak, Egypt's Former First Lady, is Detained and Under Investigation for Corruption-Related Charges*". (<http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/05/201151452710305808.html>) [online]. Diakses pada 6 Maret 2017.

tugas Militer adalah melindungi bukan membunuh.⁴¹ Sehingga hal inilah yang mendorong harus ada human security yang didapatkan para perempuan Mesir untuk memperoleh keadilan atas HAM karena apa yang dilakukan oleh militer Mesir itu sudah melanggar demokrasi itu sendiri dan pula melanggar kemanusiaan.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Definisi Konseptual Dan Operasional

1.7.1.1 Kekuasaan Otoriter

Diantara konsep politik yang banyak dibahas adalah kekuasaan. Hal ini tidak mengherankan sebab konsep ini sangat krusial dalam ilmu sosial pada umumnya, dan dalam ilmu politik khususnya. Definisi kekuasaan secara umum adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku. Yaitu kemampuan seorang pelaku untuk memberikan pengaruh terhadap perilaku seseorang sehingga sesuai atau persis dengan keinginan pelaku yang memiliki kekuasaan.⁴² Otoriter sendiri artinya berkuasa sendiri atau sewenang-wenang.⁴³ Pengertian Otoriter yaitu sebuah bentuk dari kekuasaan yang terpusat. Bentuk kekuasaan ini sangat bertolak belakang dengan sistem demokrasi. Dimana pada sistem demokrasi lebih menekankan pada kekuasaan yang tidak terpusat. Sementara sikap otoriter sering dipahami sebagai sistem politik otoriter.

⁴¹ Detik. 2011. “*Perempuan Mesir Demo Menentang Kekerasan Militer Atas Perempuan*”. (<http://www.detik.com/internasional/d-1796526/perempuan-mesir-demo-menentang-kekerasan-militer-atas-perempuan>) [online]. Diakses pada 4 Mei 2017.

⁴² Budiardjo, Miriam. 2015. “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*”. Jakarta. Hal 17-19.

⁴³ Departemen Pendidikan Nasional. “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”. Edisi Ke-Empat. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. Hal. 992.

Adapun orang yang memperoleh kekuasaan dari para pengikutnya bisa dikatakan ia memiliki kekuasaan pribadi. Meski begitu, ada juga orang yang mempunyai kedua-duanya, yaitu kekuasaan jabatan dan kekuasaan pribadi sekaligus. Mudah-mudahan, kekuasaan dapat berarti kekuasaan golongan, kekuasaan raja, kekuasaan pejabat negara. Secara operasional permasalahan negara dewasa ini semakin hari semakin kompleks dan berhubungan satu sama lain. Sebagai unsur yang paling bertanggung jawab dalam pengaplikasiannya, pemerintah dituntut untuk memiliki formulasi tepat yang merujuk pada proses penyelesaian masalah tersebut. Namun sebaliknya, pemegang kekuasaan dalam hal ini pemerintah sering melanggar hak, tidak memperhatikan aspirasi, serta kepentingan rakyat sebagai bentuk kontrak sosial dan hukum antara keduanya. Bahkan demi menjaga kepentingannya, tidak jarang pemerintah bertransformasi ke dalam bentuk rezim yang otoriter.

Rezim otoriter melaksanakan kekuasaan yang bertujuan untuk mempertahankan otoritas bahkan dominasi yang telah dibangun dengan berbagai cara, tidak terkecuali kekerasan. Jika hal ini terjadi, akan berujung terhadap menurunnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah karena berdampak kepada penurunan kualitas kesejahteraan hingga pengekangan dan pembatasan hak-hak asasi warga negara. Krisis otoritas ini dapat mendorong rakyat untuk melakukan aktivitas revolusi yang meluas dalam negara. Revolusi pada umumnya menuntut perubahan untuk perbaikan sistem kenegaraan yang lebih berpihak terhadap hak dan kepentingan rakyat. Sebagai bentuk ketidakpuasan dari rakyat, revolusi akan menentang struktur sosial dan hegemoni politik dari rezim otoriter tersebut yang

bersifat eksploitatif. Perubahan-perubahan dari revolusi yang dilakukan oleh rakyat pada dasarnya menekankan kepada hasrat pengakuan terhadap eksistensinya. Eksistensi merujuk kepada perlakuan yang adil terhadap dirinya yang baik dalam kehidupan politik dan sosialnya serta penjaminan terhadap berbagai akses ekonomi.

Husni Mubarak berkuasa sejak 1981 dan memenangi empat pemilu. Tiga pemilu pertama dinilai tidak adil karena tidak ada kandidat oposisi. Pemilu yang keempat digelar dengan melibatkan oposisi yaitu Ayman Nour tapi pelaksanaannya tidak bebas.⁴⁴ Mubarak juga melarang grup Muslim terbesar yaitu Ikhwanul Muslimin, untuk mengikuti pemilu. Mubarak tidak membolehkan masyarakat membentuk partai politik dengan bebas apalagi maju sebagai kandidat independen untuk posisi Presiden. Dia membuat aturan tokoh independen membutuhkan 250 tanda tangan dari parlemen, yang dikontrol partai berkuasa, agar bisa menjadi kandidat. Komisi Pemilihan Umum Mesir juga diberi kekuasaan nyaris tanpa batas untuk menggagalkan pencalonan kandidat. KPU Mesir bisa menutup kantor partai politik atau kandidat, menyita dananya, dan menolak mengakui keabsahan sebuah partai.⁴⁵

⁴⁴ Yunus, Machmud & Drs. Muhadi Sugiono, MA. 2014. *“Demokratisasi Pasca Husni Mubarak: Peta Kekuatan Percaturan Politik Mesir”*. UGM: Yogyakarta.

⁴⁵ Firman, Tony. 2017. *“Kejayaan & Keterjungkalan Husni Mubarak, Sang Diktator Mesir”*. (<https://tirto.id/kejayaan-keterjungkalan-husni-mubarak-sang-diktator-mesir-clBq>) [Online]. Diakses pada 13 Mei 2020.

1.7.1.2 Feminisme Islam

Feminisme adalah ideologi atau sebuah paham yang menyatakan persamaan hak antara pria dengan wanita. Secara bahasa feminisme berasal dari bahasa latin yaitu dari kata “femina” yang artinya memiliki sifat keperempuanan. Feminisme sering juga diartikan sebagai gerakan emansipasi wanita yang menyuarakan tentang perbaikan kedudukan wanita dan menolak perbedaan derajat antara wanita dengan pria.⁴⁶ Perpaduan Islam dan feminisme diadvokasikan sebagai “kepentingan feminis dan praktik yang diatur dalam paradigma Islam” oleh Margot Badran pada 2002.⁴⁷ Para feminis Islam mendasarkan argumen mereka dalam Islam dan ajarannya, memperjuangkan kesetaraan penuh wanita dan pria dalam lingkup pribadi dan publik, dan dapat melibatkan non-Muslim dalam kepentingan dan debat. Beberapa pihak meyakini feminisme Islam adalah sebuah kontradiksi karena agama Islam sendiri dianggap menempatkan laki-laki sebagai gender yang lebih tinggi derajatnya.

Namun pihak-pihak lain mengatakan bahwa Islam pada dasarnya menghormati perempuan; dan bahwa masalahnya terletak pada interpretasi patriarkal dari teks keagamaan. Secara global, gerakan feminisme Islam telah mendukung advokasi hak-hak perempuan, kesetaraan gender, dan keadilan sosial yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Gerakan ini berakar dari Islam, namun tetap

⁴⁶ Brunell, Laura & Elinor Burkett. 2020. “*Feminism*”. Encyclopædia Britannica, inc. (<https://www.britannica.com/topic/feminism>) [online]. Diakses pada 13 Mei 2020.

⁴⁷ Al-Ahram. 2002. “*Islamic Feminist: What’s In The Name?*”. Kairo. (<https://web.archive.org/web/20150320074746/http://weekly.ahram.org.eg/2002/569/cu1.htm>) [online] diakses pada 13 Mei 2020.

mempertimbangkan juga wacana feminis sekuler, Barat, atau non-Muslim.⁴⁸ Banyak organisasi dan gerakan feminis di negara-negara Muslim muncul di berbagai sistem negara dan kondisi masyarakat. Beberapa kecenderungan gerakan feminis abad ke-20 adalah upaya membentuk warga negara perempuan modern, memperbarui hukum keluarga, menghargai raga perempuan, dan menghadapi isu mobilitas dan busana perempuan salah satunya adalah Uni Feminis Mesir yang muncul karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia di Mesir. Tujuannya secara jelas memberikan arah dan masukan bagi kegiatan gerakan praktis mereka untuk pembaharuan di segala bidang, termasuk bidang moral keagamaan (spiritual). Propaganda dan dalih tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan kaum perempuan memberikan peluang pula bagi mereka.

1.7.2 Tipe Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang bersifat deksripsi. Penelitian ini akan berupaya menjelaskan tentang reputasi kekuasaan Husni Mubarak sebagai variabel berpengaruh selama memimpin Mesir. Setelah itu, menjelaskan tentang fenomena yang terjadi di negara Mesir sebagai variable terpengaruh mengenai faktor-faktor pendorong terjadinya revolusi dan dampak yang dihasilkan setelah revolusi. Kemudian, akan mengaitkan serta menganalisis fenomena tersebut dan dilanjutkan mermproyeksikan latar belakang gerakan feminis di Mesir.

⁴⁸ Fawcett, Rachele. 2013. “*The Reality and Future of Islamic Feminism*”. Afghanistan. (<https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/03/201332715585855781.html>) [Online]. Diakses pada 13 Mei 2020.

1.7.3 Jangkauan Penelitian

Dalam penulisan skripsi atau karya ilmiah jangkauan penelitian sangat diperlukan guna membatasi permasalahan yang akan diteliti, sekaligus untuk mempermudah penulisan agar tidak menyimpang dari pokok pembahasan permasalahan yang sudah dipaparkan didalam hipotesa dan latar belakang masalah. Mengingat tema penulisan kali ini sangat luas ruang lingkupnya pembahasannya penulis akan membahas sejarah sedikit dari awal mulanya terjadi revolusi ini di pemerintahan Presiden Husni Mubarak hingga dipimpin oleh Presiden Muhammad Mursi mulai tahun 2011 dikarenakan tahun tersebut menjadi awal mula revolusi di Mesir terjadi hingga tahun 2013 dikarenakan tahun tersebut menjadi awal mula gaya demokrasi mesir diterapkan pasca Revolusi. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga penulisan ini menggunakan data-data yang diluar kurun waktu tersebut bila diperlukan sebagai pembanding atau memperkuat argumen.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka (*library research*) yakni mengumpulkan data-data dari sejumlah literatur yang relevan dengan pokok permasalahan dalam objek penelitian baik berupa buku-buku, jurnal, dan dokumen. Selain itu, artikel-artikel yang bersumber dari majalah, surat kabar, hingga situs-situs internet.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah bersifat kualitatif. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif yakni dengan menghubungkan antara fakta satu dengan fakta lainnya. Hasil analisis terhadap fenomena ataupun fakta tersebut akan ditarik sebuah kesimpulan akhir.

1.7.6 Sistematika Penulisan

BAB I merupakan BAB pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum tentang permasalahan objek yang diteliti, mulai dari latar belakang masalah (LBM), rumusan masalah (RM), lalu tujuan dari penelitian yang dilakukan, manfaat penelitian yang dilakukan, kemudian kerangka penelitian, lalu sintesa pemikiran, lalu hipotesis, lalu metodologi penelitian, kemudian definisi konseptual dan operasional, lalu tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II akan membahas tentang data-data yang telah dihimpun dan dikumpulkan. Di dalam bab ini akan dijelaskan lebih luas tentang latar belakang *Arab Spring*, Husni Mubarak dan terjadinya revolusi Mesir.

BAB III akan menjelaskan mengenai asal mula masuknya paham feminisme didalam pemerintahan dan masyarakat Mesir, gerakan Feminisme Mesir, dampak revolusi Mesir terhadap perempuan di Mesir serta penjabarannya tentang Feminisme Islam.

BAB IV pada bab ini akan berisikan kesimpulan dan saran.